

PENGERTIAN ETIKA POLITIK SERTA PENDAPAT IBNU TAIMIYAH

Muhammad Azhar Latif ¹

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah & Hukum,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: azharlfff5@gmail.com

ABSTRACT

This book contains a lot of text and other files that should be removed from the site. This policy can be used to implement moral principles and values that govern the policy behavior of individuals and institutions in the policy decision-making process. The urgency of political ethics is very important in the context of state and power because it determines the quality and fairness of government governance, as well as influencing the legitimacy and trust of the public in the government and political institutions. There is a new year where there is another way to find new policies, which will help you find new and modern policies that have nothing to do with other countries. This is the reason why all political issues are different and political situations are different.

Keywords: political ethics, state and power

ABSTRAK

Jurnal ini membahas tentang pengertian etika politik serta urgensi keberadaannya dalam konteks negara dan kekuasaan. Etika politik merupakan seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku politik individu dan institusi dalam proses pengambilan keputusan politik. Urgensi etika politik sangat penting dalam konteks negara dan kekuasaan karena menentukan kualitas dan keadilan dalam tata kelola pemerintahan, serta memengaruhi legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga politik. Dalam jurnal ini, akan dibahas secara mendalam konsep-konsep dasar etika politik, serta relevansinya dalam memahami dinamika politik modern dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara dan pemerintahan. Kesimpulannya, pemahaman yang kuat terhadap etika politik merupakan landasan yang penting dalam membangun tatanan politik yang berkeadilan dan berdaya tahan dalam jangka panjang.

Kata kunci : Etika Politik, Negara dan Kekuasaan

PENDAHULUAN

Etika politik adalah salah satu aspek fundamental dalam kajian politik yang memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan kualitas sebuah sistem politik di suatu negara. Dalam konteks ini, etika politik memegang peranan krusial dalam mengatur perilaku politik individu dan institusi dalam proses pengambilan keputusan politik. Secara sederhana, etika politik dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi panduan dalam tindakan politik, baik yang

dilakukan oleh pemimpin maupun warga negara biasa.

Keberadaan etika politik menjadi semakin penting dalam konteks negara dan kekuasaan, di mana kualitas tata kelola pemerintahan sangat bergantung pada tingkat keadilan dan integritas dalam proses pengambilan keputusan politik. Etika politik juga memiliki dampak yang signifikan terhadap legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga politik. Dengan adanya etika politik yang kuat, diharapkan dapat tercipta tatanan politik yang berkeadilan dan berdaya tahan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam jangka panjang.

Dalam jurnal ini, akan diuraikan secara mendalam konsep-konsep dasar etika politik, serta relevansinya dalam memahami dinamika politik modern dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh negara dan pemerintahan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya membangun sistem politik yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berdaya tahan di masa depan.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode kualitatif, yang dimana penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat dalam teks yang diteliti (Mantra,2008:30), selain itu juga ditunjang juga dengan studi pustaka (library research) sebagai instrument pendukung dalam penelitian ini dengan menggunakan buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek yang utama (Hadi,1995).

PEMBAHASAN

Pengertian Etika

Asal-usul kata "etika" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "ethos" dan "ethikos". Secara etimologis, "ethos" merujuk pada sifat, watak, adat, kebiasaan, dan lingkungan yang baik. Dari sana, etika diartikan sebagai sesuatu yang timbul dari kebiasaan, yaitu aktivitas yang dilakukan secara berulang dan menjadi lebih mudah dilakukan. Sedangkan "ethikos" memiliki makna susila, keadaban, atau perilaku yang baik. Dengan demikian, etika pada dasarnya mengacu pada norma-norma dan nilai-nilai yang membentuk perilaku yang baik dan benar.¹

Menurut Endang Syaifuddin Anshari, secara etimologis, etika berasal dari kata "akhlaq" dalam Bahasa Arab, yang merupakan bentuk jamak dari kata "khulqu". "Khulqu" sendiri memiliki makna sajiyyah (perangai), mur'iiyah (budi), thab'in (tabiat), dan adab (kesopanan). Selain itu, etika juga terkait dengan kata-kata "khuliq" (pencipta) dan "makhluq" (yang diciptakan), menunjukkan hubungan antara perilaku manusia dengan penciptanya dan makhluk lainnya.²

¹ Weny, "Pembelajaran Etika dan Penampilan Bagi Millenial Abad 21", (Guepedia, 2021), 11-12.

² Muhammad Alfian, "Filsafat Etika Islam", (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 20-21.

Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (standard of conduct) yang memimpin individu, etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan moral yang dilakukan seseorang. Istilah lain yang identik dengan etika, yaitu susila (sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (sila) yang lebih baik (su). Kemudian Filsuf Aristoteles, dalam bukunya Etika Nikomacheia, menjelaskan tentang pembahasan etika, yaitu: (a). Terminusus Techius, pengertian etika dalam hal ini adalah etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia. (b). Manner dan Costum, membahas etika yang berhubungan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (Inherent in human nature) yang terikat dengan pengertian baik dan buruk suatu tingkah laku atau perbuatan manusia.³

Menurut K. Bertens dalam bukunya tentang etika, asal usul etika dapat ditelusuri kembali ke bahasa Yunani kuno. Dalam bahasa Yunani, kata "ethos" memiliki banyak makna, seperti tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara jamak, artinya adalah adat kebiasaan. Dalam konteks ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik dalam hal individu maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan kemudian dijadikan kaidah, aturan, atau norma yang tersebar dan diajarkan dalam masyarakat. Aturan ini, pada dasarnya, membahas perilaku manusia yang baik atau buruk. Dengan kata lain, etika bisa dipahami sebagai ajaran yang mengatur perilaku manusia, baik melalui perintah yang harus diikuti maupun larangan yang harus dihindari.⁴

Dalam konteks Islam, etika disebut sebagai akhlak. Meskipun keduanya memiliki kesamaan dalam hal objek pembahasannya, yaitu perilaku manusia yang baik atau buruk, perbedaannya terletak pada cara penentuan baik buruknya. Etika menggunakan akal pikiran sebagai tolak ukur untuk menentukan baik buruknya perilaku manusia, sedangkan akhlak dalam Islam menentukan baik buruknya berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama. Akhlak menetapkan standar perilaku baik atau buruk dengan menggunakan syariat Islam, yang terdiri dari Alquran dan Sunnah Nabi.

Pengertian Politik

Kata "politik" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "Polis," yang mengacu pada kota yang memiliki status negara. Istilah politik didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan dan melaksanakan tujuan-tujuan dari suatu sistem. Secara keseluruhan, politik adalah studi tentang relasi kekuasaan, termasuk hubungan antarwarga negara, antarwarga negara dan negara, serta hubungan antarnegara.

³ Maidiantius, "Etika Dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan", Jaffray, vol.12, no.2, 2014, 237-238.

⁴ K.Bertens, "Etika", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 4.

Dalam pengertian yang lebih umum, politik mencakup beragam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang berkaitan dengan proses menetapkan dan menjalankan tujuan sistem tersebut. Kegiatan tersebut meliputi:

- a. Pengambilan keputusan: Ini berkaitan dengan penetapan tujuan sistem tersebut.
- b. Kebijakan publik: Ini mencakup distribusi dan alokasi nilai-nilai dalam masyarakat.
- c. Untuk menjalankan kebijakan tersebut, diperlukan kekuasaan dan wewenang untuk memfasilitasi kerjasama dan menangani konflik yang timbul.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik memiliki beberapa pengertian:

1. Pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan negara, seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan.
2. Semua hal yang terkait dengan urusan dan tindakan terhadap pemerintahan negara atau negara lain, seperti kebijakan dan strategi.
3. Cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah; kebijaksanaan.⁵

Berdasarkan definisi-definisi yang disebutkan dari berbagai sumber, kesimpulannya adalah bahwa politik melibatkan upaya memperoleh kekuasaan dalam masyarakat, pengambilan keputusan bersama, pembuatan kebijakan umum, dan distribusi nilai-nilai dalam masyarakat. Politik juga terkait dengan kekuasaan, kebijakan, dan kepentingan publik, termasuk perlindungan hak-hak warga negara dan kemajuan bangsa serta negara. Selain itu, politik memiliki keterkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menerapkan berbagai pendekatan untuk menganalisis fenomena politik dalam masyarakat.

Pengertian Etika Politik

Etika politik sebenarnya merupakan bagian dari filsafat politik. Namun, perlu ditegaskan bahwa dalam konteks ini, filsafat tidak dimaksudkan sebagai kebijaksanaan hidup, sikap rendah hati, sistem nilai, pandangan spiritual, atau aspirasi terhadap hal-hal yang mulia, tetapi dalam pengertian ilmiah yang bersifat akademis dan berlandaskan pada realitas. Saat filsafat dikaitkan dengan politik, muncul filsafat politik; dan ketika filsafat politik dihubungkan dengan etika, muncul etika politik.⁶

Etika politik adalah panduan moral dan normatif untuk menilai kualitas struktur dan dinamika politik dengan mengacu pada martabat manusia. Fokus utama etika politik adalah pada legitimasi moral dari kekuasaan. Oleh karena itu, setiap pemegang kekuasaan diharapkan bertanggung jawab atas tindakannya, dan jika tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, kekuasaannya dianggap tidak sah.

Etika politik menekankan perlunya segala klaim atas hak untuk mengatur masyarakat harus dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang mendasar. Selain itu, dalam konteks ini, etika politik juga berperan sebagai alat kritik

⁵ Fajar Tri Sakti, "*Pengantar Ilmu Politik*", (Bandung: : Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 1-2.

⁶ Ayi Sofyan, "*Etika Politik Islam*", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h.7.

terhadap ideologi. Kontribusi utama etika politik terhadap pembangunan masyarakat adalah dengan menegaskan bahwa komitmen yang paling penting adalah pada pencarian kebenaran, terutama kebenaran yang praktis dan relevan bagi kehidupan masyarakat, dan hal ini layak untuk terus didorong dan dipromosikan.

Etika politik termasuk dalam kategori etika sosial, yang membicarakan norma-norma moral yang seharusnya mengatur interaksi dan perilaku antar manusia, mengingat hampir semua kewajiban manusia terhubung dengan kenyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Etika politik tidak menetapkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Secara reflektif, etika politik memberikan kontribusi pemikiran tentang bagaimana menghadapi masalah-masalah kehidupan, tetapi tidak memberikan solusi konkret untuk memecahkannya. Dengan demikian, etika politik menyoroti tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai individu manusia, bukan hanya sebagai warga negara.

Fungsi utama etika politik terletak pada menyediakan pemikiran teoritis untuk mengajukan pertanyaan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif, dan argumentatif. Oleh karena itu, peran etika politik adalah sebagai pendukung yang membantu pembahasan masalah-masalah ideologi dilakukan secara obyektif, yaitu berdasarkan argumen yang bisa dipahami dan direspons oleh semua pihak yang memahami isu tersebut. Etika politik dapat memberikan panduan, arah, dan pegangan moral bagi mereka yang ingin menilai kualitas struktur dan dinamika politik dengan mengacu pada martabat manusia.⁷

Selain itu, etika politik juga dapat digunakan sebagai alat untuk meninjau dan mengkritisi ideologi yang menjadi dasar dari penyelenggaraan negara, bukan hanya sekadar negara dan hukum itu sendiri. Ini mencakup pemahaman dan strategi legitimasi yang menjadi landasan bagi operasional negara. Dengan demikian, etika politik memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mewujudkan prinsip-prinsip yang mulia dari ideologi negara ke dalam praktik politik sehari-hari. Sebagai contoh, ini dapat terlihat dari pemikiran yang mendalam mengenai esensi keadilan sosial dan bagaimana kekuasaan harus diatur agar sesuai dengan martabat manusia.

Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Etika Politik

a. Kewajiban Mendirikan Negara

Menurut Ibnu Taimiyah, mendirikan sebuah negara atau pemerintahan tidaklah bergantung pada kesepakatan umat (*Ijma'*), yang merupakan pandangan umum di kalangan pemikir Sunni. Baginya, negara atau pemerintahan tersebut adalah suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan umat manusia dan untuk melaksanakan hukum Islam. Ibnu Taimiyah meyakini bahwa kesejahteraan umat manusia tidak bisa terwujud secara sempurna kecuali melalui kehidupan bersama dalam masyarakat yang diatur oleh seorang pemimpin.

Dalam konteks lainnya disebutkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat, serta untuk mencegah tindakan-

⁷ Runi Hariantati, "Etika Politik Dalam Negara Demokrasi", Jurnal Demokrasi, Vol. II No. 1 (Th. 2003), H.61.

tindakan yang merugikan dan tidak baik, dibutuhkan kehadiran seorang pemimpin yang diikuti dengan setia oleh rakyatnya.⁸ Kepentingan kepemimpinan bagi suatu masyarakat, Hal tersebut berdasarkan pada ajaran Islam serta prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hadits. Hadits yang di maksud antara lain, sabda Rasulullah SAW:

“Apabila ada tiga orang melakukan perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin mereka”, adapun sabda yang lain, “tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tengah padang pasir, kecuali mereka mengangkat seorang dari mereka untuk jadi pemimpin mereka”. Karakteristik ajaran Islam mencakup sistem hukum, perintah, dan larangan. Allah menyerukan agar manusia menegakkan kebaikan dan menolak keburukan, serta melaksanakan jihad, keadilan, ibadah haji, kehidupan sosial yang teratur, membantu yang teraniaya, dan menjalankan hukuman (hudud). Semua ini hanya dapat dilaksanakan dengan adanya kepemimpinan dan kekuasaan. Oleh karena itu, pada awal diskusinya tentang masalah ini, disoroti bahwa mengatur masyarakat merupakan kewajiban agama, bahkan agama tidak dapat dijalankan tanpa adanya pemimpin dan pemerintahan. Pemikiran ini secara nyata mencerminkan implementasi dari aspek-aspek pokok yang esensial (dhururiyat) dan tujuan dari hukum syariat Islam, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebaikan bagi umat manusia.

Menegaskan kebutuhan akan pemerintahan menurut Ibn Taimiyah adalah karena tuntutan ajaran agama, di mana pembentukan pemerintahan dimaksudkan untuk melayani Allah. Pengabdian kepada Allah dan kepemimpinan yang berlandaskan pada prinsip agama adalah cara untuk mendekati diri kepada-Nya. Dengan demikian, pemerintahan seharusnya dijalankan sebagai sarana pengabdian kepada Allah, bukan sebagai alat untuk mencari kekuasaan dan kekayaan pribadi. Jika hal terakhir terjadi, maka segala urusan akan mengalami kerusakan dan kehancuran. Dalam konteks pentingnya pemerintahan, Ibn Taimiyah mengutip pendapat yang menyatakan bahwa bahkan enam puluh tahun di bawah pemerintahan seorang kepala negara yang zalim lebih diutamakan daripada satu malam tanpa adanya kepala negara.

Dari penjelasan tersebut, tampaknya kemashalatan bersama hanya dapat dicapai melalui keberadaan negara yang dikelola dengan baik. Ini merupakan dasar dari konsep maslahat, di mana menciptakan kemaslahatan dan menghindari kerusakan adalah prinsip utama.

b. Landasan Amanah dan Keadilan dalam Praktik Penyelenggaraan Negara

Dalam mengelola pemerintahan sebuah negara, berbagai masalah seringkali muncul, terutama dalam hubungan antarwarga negara. Sebagai pemimpin, tugasnya adalah menjadi mediator dalam menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa menyelesaikan perselisihan yang timbul di antara masyarakat harus dilakukan sesuai dengan hukum secara adil, sebagaimana yang

⁸ Ibnu Taimiyah Majmu, a-Rasail al-Kubra, (Kairo: Maktabah al-Misriyyah), Jilid I,

diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Beberapa masalah yang sering muncul di antara masyarakat termasuk pembagian warisan, transaksi perdagangan, wasiat, ekspor-impor, serikat kerja, perburuhan, hibah, dan waqaf, semuanya harus diatasi dengan keadilan. Karena keberhasilan dalam urusan dunia dan akhirat bergantung pada tegaknya keadilan. Keadilan yang bersifat nyata mencakup penetapan harga yang adil, larangan atas penipuan dalam transaksi, dan kewajiban untuk berbicara jujur. Sementara itu, keadilan batin menjadi prinsip utama dalam setiap peraturan hukum yang harus diikuti oleh masyarakat Islam. Secara umum, larangan atas tindakan-tindakan dalam muamalat oleh Allah dan Rasul-Nya dimaksudkan untuk memastikan keadilan dan mencegah penindasan serta manipulasi demi kepentingan pribadi.

Selain menunaikan amanah dan menegakkan keadilan dengan sungguh-sungguh, para pemimpin negara juga harus mendorong budaya musyawarah. Hal ini karena Allah telah memerintahkan hal tersebut kepada Rasul-Nya. Perintah untuk bermusyawarah kepada Nabi Muhammad SAW adalah untuk mempererat ikatan hati para sahabatnya dan menjadi teladan bagi umat yang akan datang. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu mendorong praktik musyawarah di antara para sahabatnya. Keterampilan dalam bermusyawarah mencerminkan salah satu sifat orang yang beriman dan dipuji oleh Allah. Jika dalam musyawarah mayoritas menyepakati untuk mengikuti petunjuk dari Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijma' kaum muslimin, maka menurut Ibn Taimiyah adalah wajib untuk mengikuti keputusan tersebut. Tidak seorang pun, meskipun berpengaruh di bidang agama atau politik, boleh menyimpang dari keputusan tersebut. Pemimpin (ulil amri) yang disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 59 menurut pandangan Ibn Taimiyah mencakup para pemimpin negara (umara) dan ulama. Oleh karena itu, jika ingin menciptakan masyarakat yang baik, kedua kelompok ini harus terdiri dari individu yang terbaik. Dalam mewujudkan tujuan yang positif tersebut, kedua kelompok tersebut (pemimpin negara dan ulama) harus bekerja sama dengan baik, berpegang pada pedoman dari Al-Qur'an dan Hadits.

c. Islam dan Bentuk Negara

Ibnu Taimiyah tidak membahas secara eksplisit bentuk konstitusi negara Islam. Fokusnya adalah pada pentingnya kekuasaan dalam menerapkan Syariat dan kewajiban umat untuk mematuhi. Baginya, Syariat dihormati karena substansi dan isinya. Ketidakadanya rujukan terhadap bentuk pemerintahan tertentu tidak dianggap sebagai kekurangan, tetapi sebagai bagian dari kebijaksanaan Allah agar tidak mengikat.

Ibnu Taimiyah menolak pandangan Sunni dan Syi'ah, menurutnya, bahwa tidak ada dasar Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mendukung teori Imamah. Baginya, Islam adalah suatu sistem sosial yang diatur oleh hukum tertinggi, yaitu hukum Allah. Oleh karena itu, ia tidak begitu tertarik pada negara dan struktur negaranya, meskipun ia mengakui bahwa negara tersebut merupakan kebutuhan dalam agama.

Dengan kata lain, negara Islam yang ideal adalah pemerintahan yang menjadikan Syariat sebagai otoritas tertinggi.

Pandangan Ibnu Taimiyah tentang Syariat sebagai sumber kekuasaan akhir dan standar absolut bagi segala bentuk kekuasaan menghindarkan gerakan Islam dari teokrasi. Dalam sistem ini, posisi ulama tidak sama dengan pendeta karena kekuasaan mereka bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari pengetahuan mereka tentang Syariat. Ini berarti setiap muslim yang berpengetahuan tentang agama memiliki potensi untuk menjadi alim (ahli agama) dengan kedudukan yang dihormati.⁹

SIMPULAN

Ibnu Taimiyah, cendekiawan Muslim abad ke-13, menekankan pentingnya etika politik dalam kehidupan sosial. Baginya, politik bukan sekadar soal kekuasaan, tapi juga tentang keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Ibnu Taimiyah menyoroti perlunya pemimpin bertindak sesuai prinsip Islam untuk memberikan perlindungan, keadilan, dan stabilitas sosial. Pemikirannya relevan dalam menghadapi tantangan politik kontemporer dan dapat memberikan panduan bagi masyarakat Muslim dan global untuk membangun tatanan politik yang adil, stabil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayi Sofyan, *"Etika Politik Islam"*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h.7.
- Fadjar Tri Sakti, *"Pengantar Ilmu Politik"*, (Bandung: : Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 1-2.
- Ibnu Taimiyah Majmu, a-Rasail al-Kubra, (Kairo: Maktabah al-Misriyyah), Jilid I.
- K.Bertens, *"Etika"*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 4.
- Khalid Ibrahim Jindan, *"Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam"*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 67.
- Maidiantius, *"Etika Dalam Pendidikan: Kajian Etis Tentang Krisis Moral Berdampak Pada Pendidikan"*, Jaffray, vol.12, no.2, 2014, 237-238.
- Muhammad Alfian, *"Filsafat Etika Islam"*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 20-21.
- Runi Hariantati, *"Etika Politik Dalam Negara Demokrasi"*, Jurnal Demokrasi, Vol. II No. 1 (Th. 2003), H.61.
- Weny, *"Pembelajaran Etika dan Penampilan Bagi Millenial Abad 21"*, (Guepedia, 2021), 11-12.

⁹ Khalid Ibrahim Jindan, *"Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam"*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 67.